

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
ATAS PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS STREAMING ILEGAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan Oleh:
IQSHAN AQSHAL SEREZKY WIBOWO
NIM :21.C1.0105

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak positif dalam membawa kemajuan pada industri film, namun baru terkait dengan pelanggaran hak cipta, yaitu pembajakan film pada situs streaming ilegal. Pembajakan film merugikan para pemegang hak cipta khususnya dalam hal hak ekonomi pemegang hak cipta. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *streaming* ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam dan terperinci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang mengenai hak moral dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenKumHAM) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik juga melengkapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *streaming* ilegal.

Pada pelaksanaanya, ketika terjadi pembajakan film pada situs *streaming* ilegal, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya inisiatif pemegang cipta dalam menuntut haknya baik melalui jalur litigasi dan non litigasi, rumitnya prosedur hukum, dan tingginya biaya litigasi.

Kata kunci: *perlindungan hukum pemegang hak cipta, pembajakan film, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.*